

ANALISIS PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN DI PROVINSI GORONTALO

Hais Dama

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: hs_dama@yahoo.co.id

Abstrak. *Good Corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Tujuan penelitian ini meliputi (1) Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo. (2) Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo. (3) Untuk menemukan upaya-upaya untuk meminimalisir kendala dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan pelaksanaan FGD yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam menunjang hasil akhir penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* perbankan di Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan kinerja meliputi, (1). status bank sebagai kantor cabang dan cabang pembantu dan lain-lain merupakan kendala dan masalah yang menjadikan penerapan prinsip dalam *Good Corporate Governance* tidak maksimal. (2). Perlu adanya kesadaran dan kemauan dari pihak direksi, para pemegang saham, dan manajemen bank dalam menaikkan status bank cabang pembantu menjadi kantor cabang, (3). Tidak maksimalnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam perbankan di Provinsi Gorontalo menyebabkan penilaian kinerja perbankan oleh Bank Indonesia tidak maksimal. (4). Kinerja perbankan yang tidak maksimal dapat dilihat dari rasio LDR yang sangat tinggi mencapai 200% lebih. (5). Rasio ini sangat tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Provinsi Gorontalo.

Kata kunci : *Good Corporate Governance, Kinerja perbankan*

1. Latar Belakang

Provinsi Gorontalo yang merupakan propinsi termuda yang terbentuk sejak tahun 2000 hasil mekaran dari propinsi SULUT. Perkembangan perbankan di daerah ini mengalami peningkatan yang sangat tajam dari tahun ke tahun. Tercatat bahwa sejak tahun 2010 sd 2013 jumlah bank yang ada di provinsi Gorontalo sebanyak 11 Bank Umum Konvensional, 3 Bank Umum Syariah, 4 Bank Perkreditan Rakyat (BPR. Dari jumlah tersebut jaringan kantor Bank di Provinsi Gorontalo terdiri dari 15 kantor cabang, 28 kantor cabang pembantu, 14 kantor kas, dan 22 kantor unit. Sedangkan jaringan kantor BPR terdiri dari 4 kantor pusat, 4 kantor cabang dan 2 kantor kas. Jika ditinjau dari fungsi intermediasinya prestasi perbankan di Provinsi

Gorontalo hingga triwulan I – 2013 menunjukkan perkembangan yang sangat pesat yang tercermin dari indikator angka *Loan To Deposit Ratio* (LDR) sebesar 164,95% untuk kategori bank umum, dan 129,31% untuk kategori BPR, artinya bahwa dana yang tersedepan perbankan seluruhnya tersalurkan ke dunia usaha. Sementara jika dibandingkan dengan serapan dana pihak ketiga (DPK) sampai dengan triwulan I – 2013 DPK yang terhimpun sebesar 21,57% untuk kategori bank umum dan 40,97% untuk kategori BPR. Namun demikian angka tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan dana /DPK oleh perbankan masih perlu mendapatkan perhatian lebih.

Dari data tahunan Bank Indonesia Cabang Gorontalo, jika ditinjau dari aspek stabilitas sistem perbankan di Gorontalo hal yang perlu mendapat perhatian adalah resiko likuiditas, sedangkan resiko kredit dan resiko pasar relatif terkendali. Persentase kredit bermasalah khususnya pada bank umum sampai dengan triwulan I – 2013 masih berada pada batas kewajaran yakni dibawah 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia, tetapi besarnya *Loan To Deposit Ratio* (LDR) berada pada ambang yang tidak wajar yaitu mencapai angka 169,95% yang akan berpotensi pada ketersediaan likuiditas perbankan. Demikian juga dengan keberadaan kredit bermasalah atau *Non Performing Loans* (NPLs) pada bank umum menunjukkan angka 3,31% yang masih dalam tingkat kewajaran, namun terjadi peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yakni 2,06%. Angka ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit oleh perbankan di Provinsi Gorontalo masih tergolong cukup baik namun masih perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dari berbagai persoalan tersebut diatas, perhatian utama terhadap kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo adalah perlu peningkatan utamanya dari segi pengelolaannya (manajemen) seperti pengelolaan non keuangan (*Good Corporate Governance*). Oleh sebab itu dasar dari pelaksanaan penelitian ini adalah fokus pada bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan di Provinsi Gorontalo dalam menunjang dan meningkatkan kinerjanya.

Dari uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo.”

2. Kajian Pustaka

Menurut Alijoyo (2004) dalam penelitian Naja (2004) dalam arti sempit pada dasarnya *good corporate governance* berbicara tentang dua aspek yakni *governance structure* atau *board structure* dan *governance process* atau *governance mechanism* pada perusahaan. Kesimpulannya *good corporate governance* adalah serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sesuai dengan harapan para pihak yang berkepentingan lainnya. Zuang et. Al (2000) dalam Utami (2011) menjelaskan bahwa sistem *corporate governance* tersebut terdiri dari:

1. Berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan stakeholders yang lain (peraturan yang menjelaskan hak dan kewajiban pihak – pihak tersebut)
2. Berbagai mekanisme yang secara langsung atau pun tidak langsung menegakkan peraturan – peraturan tersebut.

Salah satu pilar penting dalam *good corporate governance* di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Maka dari itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung

tinggi prinsip *good corporate governance*. Prinsip-prinsip yang mengatur *good corporate governance*, diantaranya seperti *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, dan *Fairness* (TARF), yaitu:

- a. *Transparency* (Transparansi), Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
- b. *Accountability* (Akuntabilitas) Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) Adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- d. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran) Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini akan didesain dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya melalui teknik wawancara, FGD, dan teknik dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah: (1) Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo, (2) Analisis pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo, (3) Pemilihan Alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja Perbankan di Provinsi Gorontalo, (4) Merancang model pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo.

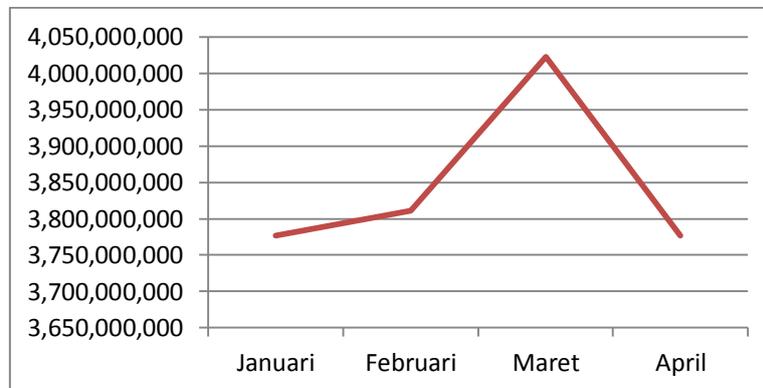
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari data Bank Indonesia perwakilan Provinsi Gorontalo sampai dengan periode April 2015, bahwa jumlah bank yang ada adalah 21 buah dengan jumlah kantor bank sebanyak 121 kantor yang tersebar di 6 Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo. Dari jumlah bank yang ada sebanyak 14 buah bank umum konvensional, bank umum syariah sebanyak 3 buah, dan BPR sebanyak 4 buah. Permasalahan yang dihadapi oleh kantor bank Indonesia Perwakilan Gorontalo adalah keberadaan status bank itu sendiri yang sebagian besar adalah bank dengan status cabang pembantu, sehingga dalam melakukan pengawasan dalam upaya penilaian kinerja perbankan sangat terhambat oleh fungsi makprudensial Bank Indonesia.

Kendala utama adalah sebagian besar laporan perbankan dengan status cabang pembantu tidak melalui kantor Bank Indonesia perwakilan Prov. Gorontalo, melainkan langsung ke cabang dimana Bank tersebut berada. Indikasinya adalah angka *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di Provinsi Gorontalo sangat tinggi dan tergolong tidak wajar yakni 213,25%. Artinya bahwa rasio simpanan masyarakat (DPK) yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito terhadap total kredit sangat tinggi. Jumlah simpanan masyarakat masih lebih sedikit dibandingkan dengan

jumlah kredit, atau dengan kata lain bahwa kemampuan bank dalam menyediakan dana kedalam fasilitas kredit sangat rendah.

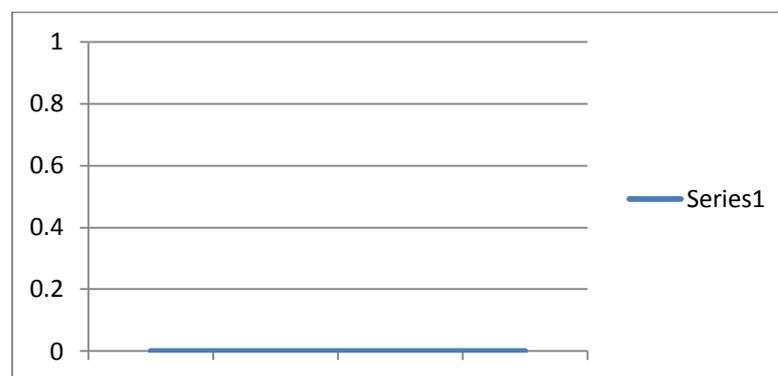
Tabel V.1 Perkembangan dana DPK Perbankan se-Provinsi Goprotalo Periode Januari – April 2015



Sumber: Data olahan BI

Dari data diatas terlihat perkembangan jumlah dana DPK perbankan se-Provinsi Gorontalo periode bulan Januari sampai dengan April 2015. Dari penjelasan pihak Bank Indonesia perwakilan Gorontalo, terjadinya penurunan jumlah dana DPK di bulan April dibandingkan dengan bulan Maret salah satu penyebabnya adalah adanya bank yang menurunkan statusnya dari kantor cabang menjadi kantor cabang pembantu. Hal ini berdampak pada pelaporan bank tersebut yang tidak lagi melalui kantor Bank Indonesia Perwakilan prov. Gorontalo, disamping persoalan lain yakni menurunnya minat masyarakat dalam menabung.

Tabel V.2 Perkembangan Penggunaan Kredit Perbankan se-Provinsi Goprotalo Periode Januari – April 2015



Sumber : Data olahan BI

Dari jbaran data diatas terlihat bahwa ada fenomena terbalik jika dinandingkan dengan data jumlah DPK yang diterima oleh perbankan se-Provinsi Gorontalo pada periode yang sama tahun 2015. Penggunaan kredit cenderung meningkat setiap bulan, sementara sumber dana masyarakat (DPK) justru terjadi penurunan. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang manajer unit kajian statistik dan survey Bank Indonesia cabang Gorontalo bapak Arnold P. Sawotong, inilah salah satu masalah perbankan di provinsi Gorontalo khususnya dimana LDR yang ada sangat tidak wajar hingga mencapai angka diatas 213,25%. Penyaluran kredit

perbankan sangat tinggi, sementara kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk kepentingan kredit sangat rendah. Permasalahan kinerja perbankan diprovinsi Gorontalo tersebut diatas, pada umumnya masih dikatakan wajar sepanjang kondisi likwiditas perbankan masih terjaga. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dikalangan perbankan di provinsi Gorontalo selama ini masih memiliki banyak kendala sehingga tidak berjalan normal sebagaimana mestinya. Penyebabnya antara lain disebabkan oleh:

1. Keberadaan kantor bank tersebut yang masih berstatus cabang pembantu, sehingga dalam penerapan pelaporan dan tanggungjawab dan informasi tidak secara langsung diperoleh oleh stakeholder.
2. Rentang kendali manajemen bank yang ada di Provinsi Gorontalo masih terlalu panjang khususnya antara dewan komisaris, direksi dan manajemen level menengah dan bawah.
3. Profesionalisme karyawan dalam menjalankan sistem *Good Corporate Governance* masih rendah.

Keberadaan kantor Bank yang ada dalam wilayah ProviNsi Gorontalo yang melakukan pelaporan pada kantor Bank Indonesia K.Pw Provinsi Gorontalo berdasarkan kode bank yang bersangkutan. Total bank yang melakukan pelaporan langsung adalah 18 buah dari total kantor bank di provinsi Gorontalo yakni sebanyak 21. Jabaran ini mengidikasikan bahwa tidak maksimalnya penilaian kinerja yang dilakukan oleh Bank Indonesia perwakilan Prov. Gorontalo, dikarenakan potensi yang seharusnya bias dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah tidak salah satunya tidak terpenuhi, yakni dari rasio LDR yang ada.

Dari berbagai persoalan dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* dikalangan perbankan di provinsi Gorontalo dalam rangka peningkatan kinerja, pilihan alternative yang dapat dilakukan antara lain:

1. Adanya niat baik dari kalangan perbankan baik terutama bank swasta yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo, untuk dapat meningkatkan statusnya dari kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang. Tujuannya adalah membantu Bank Indonesai Perwakilan Gorontalo dalam melakukan penilaian kinerja, khususnya dibidang keuangan terutama menyangkut aspek *Loan To Deposite Ratio* (LDR)
2. Bank Indonesia perwakilan Gorontalo perlu secara aktif meminta agar lembaga Otoritas jasa keuangan seharusnya sudh membuka kantor di Provinsi Gorontalo, sehinga memudahkan bank-bank yang tadinya hanya berstatus cabang pembantu menjadi kantor cabang, sehingga pelaporannya dapat diterima dan bisa berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Analisis ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan di provinsi Gorontalo masuk dalam kategori kurang baik, yang sebenarnya bukan disebabkan oleh kinerja perbankan itu sendiri, namun oleh karena kurangnya kesadaran boleh dikatakan demikian dari perbankan di provinsi gorontalo khususnya yang masih berstatus cabang pembantu untuk menaikkan statusnya menjadi kantor cabang.

Model penerapan *Good Corporate Governance* Perbankan di Provinsi Gorontalo.



Penerapan *Good Corporate Governance* dalam upaya meningkatkan kinerja perbankan di provinsi Gorontalo pada dasarnya merujuk pada 4 hal (prinsip) yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility dan Kewajaran/keadilan.

- Transparansi merujuk merujuk pada transparansi kondisi keuangan bank, transparansi dalam hal jumlah DPK dan jumlah penyaluran kredit. Transparansi ini sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bank Indonesia perwakilan Gorontalo menilai kinerja perbankan dari segi kemampuan bank tersebut dalam menyediakan dana untuk kepentingan kredit atau pinjaman nasabah. Disamping itu pula bahwa kajian ini sangat bermanfaat bagi penilaian pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Provinsi Gorontalo.
- Akuntabilitas yang dapat dilihat dari keseriusan bank-bank yang ada di Provinsi Gorontalo dalam hal pelaporan kondisi bank secara keseluruhan. Kesadaran bank dalam memberikan laporan secara akuntabel sangat dibutuhkan. Keseriusan ini dapat diukur dari kemauan direksi yang membuka kantor cabang, atau menaikkan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang, sehingga Bank Indonesia perwakilan Gorontalo dapat menerima langsung laporan bank tersebut dengan baik.
- Responsibility merupakan aspek ke tiga yang sangat penting bagi kegiatan perbankan. Aspek ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menganalisis kemampuan bank dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah. Dalam penelitian sebelumnya ("Hais Dama" ServQual perbankan-2014), khususnya di Provinsi Gorontalo aspek responsibility perbankan terhadap nasabah/stakeholder memiliki nilai kinerja sangat baik. Dari survey yang dilakukan pada penelitian tersebut, sebagai besar responden menjawab, selama ini kegiatan pelayanan perbankan dinilai dari segi responsibility manajemen bank, sangat baik dan sangat membantu mempercepat pelayanan karyawan/manajemen terhadap nasabah.
- Aspek kewajaran dalam konteks penerapan *Good Corporate Governance* sangat mendukung aspek lainnya. Pemahaman manajemen bank terhadap aspek ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi manajemen di atasnya. Aspek ini mencerminkan operasional bank dalam konteks bagaimana hubungan bank yang ditinjau secara internal maupun eksternal. Secara internal bank, aspek kewajaran dapat dilihat dari hubungan manajemen, direksi dan para pemegang saham, namun

pada bagian ini, peneliti tidak menemukan penjelasan yang mendetail, karena keterbatasan kewenangan manajemen bank tersebut. Untuk aspek eksternal, terkait dengan operasional bank itu sendiri, hal ini tercermin dalam hubungan bank tersebut dengan para stakeholder/nasabah. Perlakuan yang wajar dan adil manajemen bank terhadap para stakeholder selama ini sudah baik.

5. Kesimpulan

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam kegiatan perbankan pada dasarnya merupakan telah lama diterapkan, namun masih terkendala pada tahap implementasi, khususnya apada tingkat daerah. Khususnya pada kalangan perbankan didaerah yang selama ini dengan status kantor cabang, penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka peningkatan kinerja bank sudah berjalan dengan baik, namun masih terkendala pada rentang kendali bank tersebut seperti bentuk pelaporan yang dilakukan. Artinya bahwa pelaporan tersebut masih dipengaruhi oleh keberadaan status bank di Provinsi Gorontalo. Selama ini, bank dengan status cabang telah melakukan pelaporan di wilayah provinsi, namun untuk bank dengan status cabang pembantu, melakukan pelaporan di wilayah dimana kantor cabang bank tersebut berdiri.

6. Saran

Dari kesimpulan diatas, dapat disarankan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja perbankan dan membantu pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah, sebaiknya pihak bank dapat melakukan langkah peningkatan status bank yang ada dari kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang penuh, sehingga pelaporannya dapat dilakukan di perwakilan bank Indonesia yang ada di daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo. Disamping itu pula, perlu diupayakan di Provinsi Gorontalo segera berdiri lembaga Otoritas jasa Keuangan, sebagai lembaga pengawas bank yang berperan sebagai pengawas dalam bidang mikroprudensial.

Daftar Pustaka

- Alijoyo, Antonius, Elmar Bouma, TB M Nazmudin Sutawinangun, dan M Doddy Kusadrianto. 2004. *Review of Corporate Governance in Asia: Corporate Governance in Indonesia*. Forum for Corporate Governance in Indonesia.
- Arifin, Zaenal. 2005. "Hubungan antara Corporate Governanve dan Variabel Pengurang Masalah Agensi," *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol.1, No.10, Juni 2005.
- Bank Indonesia. 2003. Peraturan BI No 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test).
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan BI No 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan GCG Bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
- Chtourou, L., S. Marrachi., J. Bedard, 2001. *Corporate Governance and Earning Managemen*. Available online at www.ssrn.com.
- Darmawati, Deni dkk. 2005. "Hubungan Corporate Governance, Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar," *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.8, No.1, Hal.65-81.
- Dewi, Retno Kusuma (2010). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Efektifitas Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Go Publik di BEJ)*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Faisal, 2005, "Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance," *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.8, No.2, Hal. 175-190.
- Hidayat, Hendi (2009). Good Corporate Governanve di Bank Syariah. <http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/good-corporate-governance-di-bank.html> diakses pada 17 Maret 2011.
- Oktapiyani, Desi. 2009. Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Likuiditas Perbankan Nasional. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. (Tidak Dipublikasikan).
- PT Bank Swadesi Tbk. 2008. SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE LAPORAN HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE. <http://www.bankswadesi.co.id/upldoc/Laporan%20Self%20Assessment%20GCG%202008.pdf> Diakses pada 16 Maret 2011.
- Reka Dewantara, "Kajian Yuridis Prinsip Good Corporate Governance Perbankan."
- Sukamulja, Sukmawati. 2004, "Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan". Vol.8.No.1. Juni 2004. Hal 1-25.